

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kiprah UMKM

Kiprah para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sudah teruji dalam berbagai kondisi perekonomian di Negeri ini. Ketika terjadi krisis ekonomi tahun 1998 silam, banyak perusahaan besar yang mengalami kesulitan untuk eksis tetapi UMKM tetap mampu bertahan menjalankan aktivitas usahanya. UMKM juga memiliki peran yang penting terhadap perekonomian nasional karena beberapa alasan. *Pertama*, jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik serta Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM tercatat 56,5 juta unit atau 99,9% dari total unit usaha. *Kedua*, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Setiap unit investasi pada sektor UMKM dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bila dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha besar. Sektor UMKM menyerap sebanyak 101, juta tenaga kerja atau 97,16% dari total angkatan kerja yang bekerja. *Ketiga*, kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB mencapai 57,12% dari total PDB atas dasar harga berlaku tahun 2012¹.

Dengan kondisi tersebut diatas wajar pengembangan UMKM mendapatkan prioritas dalam pembangunan nasional maupun daerah. Namun pengembangan UMKM seringkali terkendala adanya persoalan mendasar. Menurut Kajian yang dilakukan oleh Bank Indonesia², persoalan mendasar UMKM yakni adanya kelemahan internal dan eksternal. Kelemahan eksternal yang dimaksud menyangkut hubungan antara pelaku usaha dengan pelaku-pelaku lain yang ada dalam jalur produksi (misalnya bahan baku) dan pemasaran. Sedangkan kelemahan internal

¹ Data terakhir yang dirilis oleh Kementerian Koperasi dan UKM, melalui www.depkop.go.id

² Laporan Akhir "Kajian Pembiayaan Dalam Rangka Pengembangan Klaster". Biro Kredit Bank Indonesia. Desember 2006

UMKM antara lain adalah kapasitas manajemen dan wirausaha yang lemah, teknis produksi dan kurangnya infrastruktur berupa pendanaan, pasar, informasi, teknologi, sarana dan prasarana.

1.2 Permasalahan Pendanaan

Sumber pendanaan usaha UMKM sebagian besar masih bertumpu pada modal pribadi dan modal keluarga. Berdasarkan hasil penelitian Bank Indonesia (2005)³, sebagian besar UMKM (64,6%) memerlukan kredit. Penghambat akses UMKM ke perbankan antara lain adalah lemahnya aspek jaminan (*collateral*) yang disyaratkan perbankan meskipun usaha yang dilakukan layak untuk dibiayai kredit. Permasalahan pendanaan UMKM tentu bukan hanya sekedar keterbatasan akses terhadap lembaga pendanaan tetapi juga jenis sumber pendanaan yang sesuai dengan perkembangan UMKM itu sendiri.

Pendekatan klaster UMKM dapat dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan berkaitan dengan skema pendanaan UMKM. Namun terlebih dahulu masing-masing klaster UMKM perlu dilakukan stratifikasi untuk mengetahui tingkat perkembangan atau strata masing-masing jenis klaster UMKM. Dengan demikian akan dapat diketahui skema/model pendanaan apa yang sesuai dengan stratanya. Sebagai ilustrasi, jika obat untuk orang dewasa diberikan kepada anak-anak maka akan terjadi overdosis, sedangkan kebalikannya jika obat anak-anak diberikan kepada orang dewasa maka tidak akan menyembuhkan penyakitnya sehingga harus sesuai takarannya agar memperoleh hasil yang optimal.

Tulisan ini berupaya memaparkan hasil stratifikasi yang menunjukkan tingkat perkembangan klaster UMKM, mendeskripsikan struktur dan jenis pendanaan yang digunakan oleh masing-masing klaster UMKM dan menyusun skema pendanaan berdasarkan stratifikasi klaster UMKM. Adapun yang menjadi obyek amatan adalah klaster UMKM di Kota Salatiga.

³ Biro Kredit Bank Indonesia, Hasil Penelitian Profil Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia, Bank Indonesia, 2005